

**PAPUA MENGGUGAT:
Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat!**

Sem Karoba, dkk

**PAPUA MENGGUGAT:
Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat!**

watchPAPUA

PAPUA MENGGUGAT: Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat!

Surat-Surat Terbuka Anak Koteka: Edisi IVc - Kepada Yth.: Poros Jakarta - Papindo

Penulis & Editor: **Sem Karoba**, (koteka@koteka.org)

Co-Editors: Z. Tawy Lakwa dan Mr. Joseph Baweng

Cover Design: Sri Kuncana (Galangcomm)

Layout: Lailia Rachmani (Galangcomm)

Kerjasama Penerbit: **watchPAPUA**

1. Segel - XI414

Buku ini disegel dan dimeteraikan untuk “dibaca” oleh Gubernur koloni NKRI di Papua Barat bersama semua kelompok masyarakat Papua dan elit politik Papua Pro-Otonomi, yaitu orang Papua Indonesia alias Papindo.

Atas nama umat manusia, hewan, tumbuhan, kandungan alam, mereka yang sudah mati (tulang-belulang yang berserakan di tanah Papua), yang hidup dan yang akan lahir, serta semua makhluk di Tanah Papua, atas nama Tuhan Pencipta Langit dan Bumi, Allah sb.wt., Raja sepanjang Masa, Raja Bangsa Papua.

**Lebih baik teguran yang nyata-nyata dari pada
kasih yang tersembunyi.**

**Seorang kawan memukul dengan maksud baik,
tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-
limpah.**

(Alkitab, Amsal Sulaiman 27:5,6)

2. Persembahan

Hari ini tanggal 15 September 2004, tetapi saya telah diberitahu hatinurani saya bahwa Susilo Bambang Yudhoyono – Yusuf Kala adalah calon pemimpin NKRI mendatang. Karena itu, biarlah Buku Ketiga Papua Menggugat Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat! ini dipersembahkan kepada mereka, dengan harapan semoga mata hati dan naluri mereka berdua akan terbuka untuk berpatokan kepada rasio dan aturan main daripada perasaan dan nasionalisme yang memababuta.

3. Ucapan Terimakasih

Buku ini pasti tidak akan pernah hadir di tangan Anda dalam bentuk dan isu seperti yang Anda pegang saat ini tanpa uluran tangan berbagai pihak: baik orang Papua maupun masyarakat Indonesia. Pertama, penulis atas nama AMP International menyampaikan "Ucapan Terimakasih" kepada orang tua, baik dalam konteks keluarga maupun sebagai anggota masyarakat adat, yang telah dengan jerih payah membangun panutan dan memberikan didikan yang berguna, yang mendasari pemikiran untuk merasa perlu menulis buku ini dan selanjutnya *Koteka Tribal Assembly* atas dukungan dana yang tidak sedikit.

Kedua, kepada pihak Galang Press yang telah bersedia mencetak buku-buku karya anak Papua, walaupun banyak tantangan dan ancaman yang dialaminya sebagai sebuah usaha percetakan. Ada kesadaran penuh bahwa pencetakan buku seperti diterbitkan *watchPAPUA* punya resiko-resiko tertentu, tetapi Galang Press telah mengambil langkah sadar yang begitu berarti, baik demi menjelaskan akar-akar dan status persoalan di Papua Barat yang begitu menumpuk dan begitu kumatnya ataupun untuk sekaligus dan terutama memberikan kemungkinan-kemungkinan langkah untuk sedikitnya mengimbangi, kalau bukan menyelesaikan persoalan yang mengendap begitu lama dan tak pernah dibuka sedikitpun juga.

Ketiga, terimakasih kepada Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional di Kota Gudeg Yogyakarta atas dorongan dan dukungan untuk menulis buku ini

Untuk terbitan kedua ini, penulis mau menyampaikan terimakasih banyak kepada pengamat politik dan Dosen FISIPOL UGM Yogyakarta A. Ari Dwipayana, SIP, M.Si. atas kritikan dan masukan yang membangun. Penulis telah diperkaya dengan bantuannya.

Akhirnya, terimakasih kepada semua pembeli buku-buku kami karena kami berbuat dan melangkah tanpa dukungan dan pesan-pesan sponsor asing. Dengan membelinya, Anda telah mendukung perjuangan yang dilandasi ketulusan dan kebenaran. Amin!

Tim Penulis.

4. Sekapur Sirih dari Penulis

Beban untuk menulis buku ini timbul waktu melihat ada hal-hal yang salah besar, yang tidak benar dalam politik di NKRI dan Papua Barat. Dasar sebagai seorang guru yang bertugas mengajarkan kebenaran ilmiah, saya merasa harus menulis "kebenaran" ini: Yaitu bahwa Otsus untuk Papua Barat itu sarat dengan kepentingan: kepentingan pribadi, kepentingan lokal, kepentingan nasional, kepentingan regional dan kepentingan internasional.

Kepentingan-kepentingan itu bergesekan satu sama lain saat berinteraksi dalam rangka menempatkan diri dalam perikehidupan dunia ini, yang dalam buku ini saya secara kasar sebut, *cari makan*. Paket Otsus bagi Papua Barat adalah salah satu hasil gesekan dan atau interaksi kepentingan itu.

○ Tetapi kepentingan-kepentingan siapa yang bergesekan ?

Tentu saja NKRI sebagai yang mengaku diri punya wilayah Papua Barat. Juga jelas orang Papua sebagai bangsa yang "kebetulan" dilahirkan dan tinggal di sana. Lalu ada juga kepentingan orang lain, orang di luar NKRI dan di luar Papua Barat, yaitu pihak asing, yang juga mengaku bukan punya hak milik tetapi punya hak pakai. Tetapi ada juga kepentingan pribadi dan kelompok tertentu di dalam NKRI maupun Papua Barat. Empat kepentingan ini bergesekan, berlomba dan berusaha menang.

Tetapi saya sedih setengah mati melihat *outcome* dari gesekan itu selalu *mengorbankan Papua Barat, dan memperalat NKRI*. Yang untung bukan keduanya, tetapi yang paling dirugikan adalah Papua Barat. Lebih sedih lagi melihat orang Papua sendiri katakan: "*Otsus adalah jalan terbaik!*" Mungkin saya salah karena yang mengatakannya bukan seorang guru, tetapi seorang politisi, jadi memang dia harus bersandiwara. Dan sandiwara itu tidak harus untuk dia, tetapi ada dalang di belakang dia. Mungkin juga saya salah karena saya menjadi guru dan harus merasa gelisah melihat Otsus dipolitisir luarbiasa. Itulah sebabnya saya panggil paket ini Politik Otonomisasi, bukan paket Otsus atau pembangunan melalui Otsus.

Tetapi tidak ! Saya harus mengatakan kebenaran. Itu tugas saya sebagai guru. Itu tugas saya sebagai manusia dan sebagai orang Papua. Itu tugas saya sebagai orang yang sudah paham tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Pergulatan sengit berkepanjangan dalam bathin saya itu dimenangkan oleh "kebenaran mutlak." Saya dipaksa tidak bersandiwara juga, seolah-olah tidak tahu, atau tidak mau tahu dan tidak mau bertanggungjawab. Bukti kemenangan itu adalah buku ini. Saya percaya sungguh, "kebenaran mutlak" itu sudah menang dan pasti menang, seterusnya dan selamanya, apapun rintangannya, siapapun penguasanya, tak perduli.

Dan lebih penting dari sekedar karena saya seorang guru, ada alasan yang hakiki. Amsal Raja Sulaiman 27 : 5 dan 6 berkata:

**5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi.
6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah.**

Sama persis dengan nasehat Alarhumah Ibunda saya yang sudah ratusan bahkan ribuan kali memukul saya dengan rotannya yang dibuat khusus untuk mendidik saya:

"Eh, anak, kamu harus mau dan berusaha tinggal dengan orang yang punya suara. Kamu harus senang punya mamak suka pukul kamu. Jangan tinggal dengan orang ramah dan senyuman setiap saat. Jangan senang tinggal dengan orang yang berdiam diri yang tidak mendidik. Karena dengan penasehat yang banyak dan terbuka itu engkau akan menjadi bijak dan anak yang berguna."

Saya lebih condong mengkleim nasehat dari dua sumber ini, karena keduanya berasal dari orang-orang yang paling mengasihi jiwa dan masa depan saya, yang menyampaikannya atas dasar kemanusiaan, secara jujur dari hati nurani mereka.

Sekarang saya teringat ucapan Haji Harmoko, sang Ketua MPR RI, dua minggu sebelum Suharto dilantik menjadi presiden: "Kami sudah tanyakan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan mereka mau Suharto dipilih kembali menjadi Presiden."

Lalu orang sama, dalam kapasitas yang sama, dalam bulan yang sama, melalui TVRI yang sama pula mengatakan: "Saya sudah bertemu Suharto dan menyarankan agar Suharto mundur saja dari jabatan sebagai Presiden!"

Itulah sosok dan gambaran politik NKRI, “Di kulit berpura-pura baik, tetapi di dalamnya terjadi pembusukan yang luarbiasa hebat, sampai-sampai tetanggapun ikut merasa tidak enak karena bau busuknya politik NKRI.”

Saya secara pribadi sebagai sebuah insan manusia ciptaan Tuhan yang kebetulan ada di Papua Barat dan kebetulan masih sebagai WNI merasa HARUS berterus-terang tentang apa yang saya tahu, perihal kesalahan-kesalahan yang diulangi NKRI dan elit Papua. Itu didikan Ibunda Alharhumah saya, itu ajaran agama saya dan itu pelajaran dari pengalaman saya dalam politik NKRI. Itu adat Papua seperti yang diperjuangkan Alm. Theys H. Eluay, yaitu kejujuran untuk keadilan, kebenaran dan kasih bagi Papua Barat dan kemanusiaan.

Saya kira cukup sekian, karena saya tidak mau bersandiwara juga, tetapi !!!
Wassalam !

Negeri Niger-Eropa,
Republik Irlandia,
22 Oktober 2001,
15 :30 GMT (22 :30 WIB)

5. Intisari Buku

Setelah Papua Menggugat peristiwa November Kelabu 2001: -hari wafatnya Alm. Ondofofo Dorthays Hiyo Eluay, melalui buku ini Papua kembali *Menggugat: Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat* dengan dua dalih utama:

- Bahwa Politik Otonomisasi (atau Otsus II 2002-2027) adalah murni hasil konspirasi internasional, sebagai tindak lanjut dan limbah konspirasi politik sebelumnya (yaitu Otsus I 1963-1988) di Papua Barat.
- Bahwa kebijakan atas konspirasi itu tidak saja mengorbankan manusia, hewan, tumbuhan dan segala makhluk serta kandungan alam Bumi Cenderawasih, TETAPI lebih-lebih telah menggadaikan NKRI dan seluruh kehidupan masyarakat Indonesia ke dalam lumpur dan barisan krisis yang mengerikan kalau dibayangkan.

Dengan alasan-alasannya, PAPUA MENGGUGAT Politik Otonomisasi di Papua Barat atas nama dan untuk bangsa Indonesia dan bangsa Papua; menggugat penguasa dan institusi Negara Kesatuan R.I. sebagai kaki-tangan dan budak kapitalisme, yaitu kolonial-imperialis yang telah memalangkan nasib bangsa Indonesia dan bangsa Papua, yang telah menjerumuskan kedua bangsa dari krisis yang satu kepada kemalangan yang lain tanpa peri kemanusiaan, tanpa menghargai demokrasi dan hukum dan menyatakan diri: “Dengan resmi Keluar!!!” dari lingkaran setan konspirasi politik internasional yang telah menggadaikan nasib, mendamparkan kehidupan dan menggadaikan hidup kami di tangan mesin-mesin kapitalisme yang tidak berperikemanusiaan.

Memperjelas gugatannya, antara lain Papua menjawab pertanyaan seperti:

- Apakah benar Otonomi Khusus bagi Papua Barat adalah “Jalan Terbaik?” “Jalan Terbaik!” bagi siapa? Atau Siapa yang sebenarnya beruntung atau diuntungkan oleh kebijakan ini?
- Apa latar belakang pikiran masing-masing pihak: apakah atas dasar karena mau membantu rakyat Papua, rakyat Indonesia, NKRI dan Papua Barat? “Apakah benar Politik Otonomisasi benar kebijakan Jakarta: murni untuk NKRI dan bangsa Papua dalam kerangka NKRI?”
- “Mengapa Jakarta harus setengah mati ke London-Canberra-Washington untuk mengambil jawaban tadi?” Bukankah ada sesuatu di balik itu?

- Benarkah kalau orang Papua menerima Otsus berarti menunda niat dan aspirasi "M"? 'Apakah Otsus berjalan berarti "demi itu membatalkan M"? "Haruskah orang Papua menolak atau menerima Otsus?" Dan "Mengapa "Ya!" atau "Tidak!"?"
- Apa kaitan istilah Otsus dengan kamus politik *freedom, self-determination, independence, autonomy, self-government*, dll? Apa kaitannya dengan perpolitikan dunia yang dipimpin AS dan Eropa lewat PBB?
- Apa nasib NKRI, bangsa Indonesia, Eropa, AS, Papua Barat sebagai dampak dari Politik Otonomisasi ini? Atau Siapa yang sebenarnya yang untung? Untung dalam hal apa? Mengapa bisa beruntung? Mengapa bisa merugi? Bagaimana caranya mengurangi kerugian dan mengoptimalkan keuntungan bagi bangsa Papua?

6. Sekedar Mengantar Buku III:

Ada retorika dan paksaan bahwa "Kalau menerima Otsus berarti membatalkan aspirasi Papua Merdeka." Dan Kalau Menolak Otsus berarti "M" maka mereka itu adalah musuh NKRI. Padahal perihal politik otonomisasi untuk sebuah

bangsa dan politik perjuangan kemerdekaan untuk sebuah bangsa dan negara adalah dua hal yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi, apalagi saling menghalangi.

Sebenarnya tidak ada persoalan dan pertentangan antara Otsus dan Papua Merdeka, karena ada alasan yang jauh lebih hakiki, lebih berbobot dan berskala internasional dan jauh lebih kuat daripada sekedar menolak berarti pemberontak atau menerima Otsus ditukar dengan nilai aspirasi "M". Persoalan itu tidak hanya sekedar karena NKRI memutuskan memberlakukan Otsus mulai 1 Januari 2002 dan tidak sejauh karena Indonesia dalam era reformasi pasca regime Suharto. Cerita itu juga bukan karena kekerasan militer di Papua Barat dan bukan karena ketidakadilan di masa regime Orde Baru. Bukan juga karena orang Papua minta sesuap nasi dan pembangunan jalan-jalan, gedung-gedung bertingkat dan meminta agar jadi sama dengan orang Indonesia. Tidak ada kaitan dengan orang Papua bangsa Melanesia

yang mayoritas penduduknya begarama Krisnten dan Indonesia didominasi oleh pemeluk agama Islam. Sama sekali tidak!

Cerita itu punya akar jauh-jauh sebelumnya. Dan orang Papua dari kecil sampai yang besar, dari tumbuhan sampai hewan, dari yang bergerak sampai yang tidak, dari yang kasak mata sampai yang tak nampak di mata kita, dan dari yang mati, yang hidup maupun yang akan lahir tahu mengapa mereka punya aspirasi yang tidak sejalan dengan kemauan Jakarta.

Untuk mengungkap hal-hal ini Papua mencoba membentangkanantang, bantahan, yang mendasari gugatan. Kemudian, Papua juga mengundang pembaca sekalian untuk mengambil langkah-langkah mengimbangi tantangan dan bantahan dimaksud.

Perlu diperhatikan bahwa Bab dan Pasal dalam Buku Ketiga ini merupakan sambungan dari Bab dan Pasal Buku Kedua.

7. Catatan Pengantar A.A. Dwipayana, SIP, M.Si.¹

8. Daftar Bagan

¹ Sebagaimana disampaikan dalam bedah Buku I dan Buku II: PAPUA MENGGUGAT: Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat, tgl.... Di Asrama Mahasiswa Papua,, Yogyakarta.

9. Daftar Table

10. Daftar Isi

1. Segel - XI414	viii
2. Persembahan	ix
3. Ucapan Terimakasih	x
4. Sekapur Sirih dari Penulis	xi
5. Pendahulaun	xiv
6. Sekedar Mengantar Buku III	viii
7. Kata Pengantar dari Dr.	
8. Daftar Isi	xix

BAB – VIII:

MEMBENTANGKAN POKOK-POKOK SENGKETA

<i>Pasal Duapuluh Empat: POKOK-POKOK SENGKETA POLITIK</i>	3
24.1 Kesatu: Fakta Kongres Papua I 1961 (1 Desember 1961)	4
24.2 Kedua, Pengakuan Sukarno dalam Butir Trikora (19 Desember 1961)	6
24.3 Ketiga: The New York Agreement (15 Augustus 1962)	8
24.4 Keempat, The "Secret" Memmorandum of Rome (30 September 1962) dan The Rome Joint Statement (20 – 21 Mei 1969)	12
24.5 Kelima, Penyerahan Papua Barat dari UNTEA kepada NKRI (1 Mei 1963)	17
24.6 Keenam: PEPERA (14 Juli – 2 August 1969)	18
24.7 Ketujuh: Resolusi SU PBB No. 2504 (XXIV) (19 November 1969)	20

Pasal Duapuluh Lima: PERSDALAN HAM, HUKUM DAN DEMOKRASI

25.1 Soal HAM, Demokrasi, Supremasi Hukum dan Pembangunan	23
25.2 Lanjutan saran untuk Memajukan Demokrasi, HAM dan Penegakkan Hukum dalam Otsus	31

Pasal Duapuluh Enam: MEMBANTAH POLITISASI IDE "O" DENGAN ASPIRASI "M"

26.1 Maksud Otsus 'Jalan Terbaik' bagi Penyelesaian Konflik Politik di Papua Barat	39
26.2 Bantahan bangsa Papua atas Retorika: "Otsus adalah 'Jalan terbaik' bagi Penyelesaian Konflik Politik di Papua Barat"	46
26.3 Bantahan bangsa Papr	

<i>Pasal Duapuluh Tujuh: MENANTANG POLITIK OTONOMISASI</i>	57
27.1 Pengantar	57
27.2 Contoh Reparasi Uni Afrika - Uni Eropa	59
27.3 Contoh <i>Healing Journey</i> di Benua Australia	61
27.4 Contoh the <i>Truth and Reconciliation Commission</i> di Afrika Selatan	62
27.5 Contoh Pembayaran Kompenassi kepada Warga Yahuni	63
27.6 Maka Otsus II di Papua Barat adalah Upaya Tambal Sulam atas <i>Hollocust</i> dan Mengobati Memoria Passionis bangsa Papua	65

BAB - IX:

DEMI MASA DEPAN RAKYAT INDONESIA DAN BANGSA PAPUA – PAPUA MENGGUGAT POLITIK OTONOMISASI NKRI DI PAPUA BARAT

<i>Pasal Duapuluh Delapan: PAPUA MENGGUGAT!</i>	69
28.1 Menggugat Proses Politik Otonomisasi	71
28.2 Menggugat Politik Otonomisasi	72
28.3 Menggugat Politisasi Otonomi	76
28.4 Menggugat Hati Nurani	79

BAB-X:

PAPUA MENGUNDANG!

<i>Pasal Duapuluh Sembilan: DUA TUGAS KAUM PAPINDO</i>	86
29.1 Tugas yang Harus Dilaksanakan	87
29.2 Hal-hal yang harung ha	

BAB – D:

RANGKUMAN & ANALISIS

PASAL KOSONG SATU: RANGKUMAN-RANGKUMAN

PASAL KOSONG DUA: ANALISIS KRITIS

PASAL KOSONG TIGA: PERTANYAAN-PERTANYAAN RENUNGAN

CATATAN KAKI DAN REFERENSI: 132

BUKU-BUKU TERBITAN *watchPAPUA AND ASSOCIATES*